

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Ilmu Hubungan Internasional adalah studi hubungan dan interaksi antarnegara yang mencakup aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional hingga perusahaan multi nasional (Jackson & Sorensen, 2014). Penelitian ini termasuk dalam lingkup hubungan internasional karena membahas kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bidang perdagangan. Kebijakan luar negeri termasuk lingkup hubungan internasional sebab melibatkan aktivitas-aktivitas yang melampaui batas-batas Negara. Skripsi ini akan membahas mengenai perubahan strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bidang perdagangan pada era Donald Trump dan hubungannya dengan defisit neraca perdagangan barang.

Salah satu upaya untuk mendapatkan pendapatan bagi suatu negara adalah melalui perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak dari satu negara dengan lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Pihak yang dimaksud dapat berupa antar individu, individu dengan pemerintah hingga antar pemerintah dari dua atau lebih negara yang berbeda.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi dilakukannya perdagangan internasional, yaitu, negara tidak dapat secara penuh memenuhi kebutuhannya dari produk hasil negara sendiri. Maka dari itu, negara-negara menggunakan perdagangan internasional sebagai sarana pemenuhan kebutuhan. (Wonnacott, 2019) berpendapat bahwa pada dasarnya perdagangan internasional bertujuan untuk menyediakan komoditas yang kuantitasnya kurang memadai di suatu negara yang kemudian ditukar oleh komoditas yang dihasilkan secara melimpah; transaksi semacam ini yang dilakukan bersamaan dengan kebijakan ekonomi lainnya, dapat meningkatkan standar kehidupan masyarakatnya. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, terutama yang memiliki perbedaan geografis dan

tingkat pertumbuhan teknologi yang mencolok memiliki komoditas yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dianalogikan sebagai *puzzle*, dimana komoditas dari suatu negara akan mengisi kebutuhan negara mitranya dan sebaliknya. Karena itu, timbullah hubungan saling menguntungkan antar negara ini.

(Sherlock & Reuvid, 2008) mengemukakan bahwa setidaknya ada dua tipe pola perdagangan antar negara, pertama, kondisi dimana suatu Negara tidak dapat memproduksi suatu komoditas maka mereka akan mengimpor komoditas tersebut dan kedua, dimana suatu Negara sebenarnya dapat menghasilkan suatu komoditas namun mereka tetap melakukan impor. Alasan untuk tipe pola perdagangan pertama sangat jelas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan serta mencukupi *demand* dari suatu barang yang melonjak. Tipe pola perdagangan kedua lebih sarat akan kepentingan dan menggambarkan perdagangan internasional dewasa ini. Alasan dibalik perdagangan tipe kedua ini juga lebih kompleks daripada tipe sebelumnya. Sebagai contoh, Inggris mengimpor mobil, batu bara, minyak, perangkat televisi, peralatan rumah tangga dan bawang putih, peralatan IT dan pakaian yang sebenarnya dapat diproduksi dengan baik di dalam negeri. Secara gamblang, hal ini terlihat seperti pemborosan sumber daya, namun, alasan untuk mengimpor kategori produk ini umumnya terbagi dalam tiga klasifikasi: pertama, barang impor menawarkan harga yang lebih murah dibanding barang yang diproduksi dalam negeri. Kedua, impor menyediakan variasi barang yang lebih beragam. Ketiga, barang-barang impor dapat menawarkan keuntungan selain harga yang lebih rendah daripada produksi dalam negeri, misalnya kualitas atau desain yang lebih baik, status yang lebih tinggi (misalnya *prestige labelling*), fitur teknis, dll.

Selain untuk sarana pemenuhan kebutuhan, perdagangan internasional juga dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menambah kas negara. Pendapatan negara dari perdagangan dapat dilihat dari neraca perdagangan. Menurut Pujoalwanto dalam (Ginting, 2014) “neraca perdagangan merupakan suatu ikhtisar yang memuat semua transaksi ekspor dan impor barang dari suatu negara”. Apabila nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor, maka neraca perdagangannya dapat dikatakan

defisit dan sebaliknya, apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, maka neraca perdagangan dapat dikatakan surplus. Sedangkan, apabila nilai ekspor dan impor suatu negara sama, maka neraca perdagangannya dapat dikatakan berimbang.

Perdagangan internasional juga menjadi sarana bagi negara-negara untuk memperluas pasar dari suatu negara. Hal ini dapat ditempuh melalui kerjasama perdagangan bilateral, regional hingga multilateral. Selain itu, tiap negara tentu memiliki ambisi untuk memperoleh neraca perdagangan yang surplus. Maka, perdagangan internasional juga merupakan arena yang kompetitif.

Sejarah perdagangan internasional dimulai dari aktivitas barter antar umat manusia yang telah terjadi sejak dahulu kala, bahkan sama dengan berlangsungnya sejarah peradaban umat manusia. Kemudian kegiatan ini berkembang menjadi pertukaran di tingkat lokal dan internasional. Perdagangan merupakan instrumen utama untuk perjalanan dan ekspansi kolonial.

(Wonnacott, 2019) menyatakan bahwa sejarah perdagangan internasional dibagi menjadi empat era, yaitu: era merkantilisme, era liberalisme, kebangkitan proteksionisme dan era neo-merkantilisme. Pemikiran merkantilisme mencapai puncaknya pada abad ke 16 dan 17 di Eropa. Para merkantilis menegaskan bahwa perolehan kekayaan, khususnya dalam bentuk emas, penting bagi kebijakan nasional. Secara sederhana, pemikiran merkantilisme adalah untuk mendorong ekspor, membatasi impor dan mengambil hasil dari surplus ekspor yang dihasilkan dalam emas. Pada pertengahan abad ke 18, terdapat reaksi yang kuat untuk menentang paham merkantilisme. Sejumlah ekonom atau yang disebut sebagai *Physiocrats* di Perancis meminta adanya kebebasan produksi dan perdagangan. Perubahan sikap ini menyebabkan penandatanganan sejumlah perjanjian yang mewujudkan ide-ide liberal baru tentang perdagangan, diantaranya Perjanjian Inggris-Perancis tahun 1786, yang mengakhiri perang ekonomi antara kedua negara. Hal ini tidak berarti bahwa negara-negara meninggalkan semua kebijakan merkantilis. Pemerintah tetap melakukan upaya untuk melindungi produksi nasional dengan cara membatasi barang dari luar pasar domestik. Untuk itu, negara

menerapkan sistem bea cukai untuk menggantikan sistem larangan langsung pada impor.

Penerapan pemikiran liberal pada perdagangan internasional terjadi dengan dibuatnya perjanjian perdagangan Anglo-France antara Inggris dan Perancis pada tahun 1860. Namun, pada pertengahan abad ke 19, penggunaan kebijakan bersifat proteksionis kembali menyebar ke seluruh Eropa. Fenomena ini dipicu oleh Jerman yang menerapkan kebijakan proteksionis secara sistematis yang kemudian diikuti oleh negara Eropa lainnya. Selain itu, Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan ultra proteksionis melalui *McKinley Tariff Act of 1890*. Negara yang satu-satunya tetap berpegang pada sistem perdagangan bebas hanyalah Britania Raya.

Apabila dibandingkan dengan kebijakan proteksionisme pada abad ke 16 dan 17, proteksionisme pada abad ke 19 tergolong lebih ringan. Pada tahun 1913, kebebasan ekonomi berlaku secara ekstensif. Pembatasan secara kuantitatif jarang dilakukan, bea cukai rendah dan stabil. Mata uang secara bebas dikonversi menjadi emas, yang pada dasarnya adalah uang internasional yang umum.

Krisis ekonomi melanda dunia pada akhir 1920an hingga 1930an, yaitu the *Great Depression*. Penurunan ekonomi pada tahun 1920, diikuti oleh keuntungan komersial yang timbul di negara-negara yang mata uangnya mengalami depresiasi (seperti halnya Jerman), mendorong banyak negara untuk memberlakukan pembatasan perdagangan baru. Negara-negara berusaha untuk menopang neraca pembayaran mereka dengan menaikkan bea cukai mereka dan menerapkan sejumlah kuota impor atau bahkan larangan impor, disertai dengan kontrol pertukaran. Pasca perang dunia kedua, perjanjian perdagangan dan organisasi supranasional menjadi sarana utama dalam mengelola dan mempromosikan perdagangan internasional.

Sebagai dua kekuatan ekonomi pada pasca perang dunia kedua, Amerika Serikat dan Britania Raya memiliki sebuah ambisi untuk membangun sistem internasional yang lebih terbuka dan kooperatif. Untuk itu, mereka mengadakan

konferensi *Bretton Woods*. Konferensi ini menghasilkan tiga organisasi supranasional dengan tugas yang berbeda-beda, yaitu *International Monetary Fund*, *International Trade Organization* dan *World Bank*.

Selayaknya perdagangan global, sistem perdagangan Amerika juga berkembang dari proteksionis ke pasar bebas. Dari awal abad kesembilan belas, perdagangan adalah masalah memecah belah dalam politik Amerika — khususnya negara-negara bagian pabrikan dan negara produsen. Negara-negara pabrikan di utara mencari perlindungan dengan menerapkan tarif yang tinggi untuk komoditas impor yang bersaing; produsen kapas di selatan mendukung kebijakan perdagangan terbuka untuk mempromosikan ekspor mereka.

Beberapa dekade kemudian, trend umum dalam perdagangan Amerika adalah bersifat proteksionis dengan tujuan melindungi perusahaan di utara. Tren ini memuncak pada penerapan *Smoot-Hawley Tariff Act* pada tahun 1930. Namun, pada pemerintahan Theodore Roosevelt, tren tersebut menjadi berbalik (Destler, 2016). Pada saat itu, Cordell Hull, selaku *secretary of state*, merupakan pendukung sistem perdagangan bebas dan memiliki kepentingan yang mewakili negara bagian di mana ia berasal, Tennessee untuk menurunkan tariff yang ada pada *Smoot-Hawley Tariff Act*. Hull mengambil tindakan untuk melakukan negosiasi perdagangan asing, karena apabila ia hanya menurunkan tariff pada *Smoot-Hawley Tariff Act*, ia khawatir pemerintah setelahnya dapat menaikannya kembali.

Amerika Serikat akan mereduksi tariff apabila negara mitra dagangnya pun mereduksi tarifnya. Kongres amerika merealisasikan dan mengesahkan negosiasi tersebut melalui *Reciprocal Trade Agreement Act* tahun 1934. Undang-undang baru ini mengatur bahwa setelah tariff yang lebih rendah dinegosiasikan, tarif tersebut dapat berlaku dengan proklamasi presiden. Tidak diperlukan tindakan Kongres lebih lanjut. Dan harga yang lebih rendah akan diperluas ke semua mitra dagang utama Amerika Serikat.

Pada awalnya, negosiasi presiden hanya terbatas pada perjanjian bilateral saja. Namun setelah Perang Dunia II, di tengah keinginan untuk mengintegrasikan dan membangun kembali ekonomi pasca perang, Amerika Serikat memimpin penciptaan perjanjian multilateral tentang tarif dan perdagangan, yang dikenal sebagai *General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT). Di bawah naungannya, negara-negara melakukan serangkaian negosiasi untuk mengurangi hambatan perdagangan. Negosiasi ini kemudian lebih dikenal sebagai ‘putaran’, putaran yang paling menonjol di GATT adalah Putaran Kennedy (1963-1967), Putaran Tokyo (1973-1979) dan Putaran Uruguay (1986-1984). Sebagai hasil dari negosiasi ini, tingkat tariff Amerika Serikat (untuk impor yang dikenakan tarif) turun dari rata-rata 60% pada 1930 menjadi 5,7% pada 1980 (dan turun lebih jauh menjadi 2,7% pada 2013). (World Trade Organization, 2018).

Pada tahun 1980-an hingga 1990-an Amerika Serikat terus meliberalisasikan perdagangannya. Di bawah pemerintahan Ronald Reagan, Amerika Serikat menerapkan kebijakan ekonomi yang liberal atau yang dikenal sebagai *Reaganomics*, antara lain memotong secara masif pengeluaran pemerintah, pemotongan pajak penghasilan yang drastis dan mengembalikan sistem nilai tukar emas, dimana dolar cenderung disediakan oleh mekanisme pasar daripada pemerintah. Menurut (Magazzino, 2010) kebijakan ekonomi Amerika pada tahun 80-an adalah kebijakan yang paling banyak dipelajari dan menuai perdebatan apabila dibandingkan pada kebijakan di tahun-tahun lainnya, termasuk pada tahun 1930-an. Pada dekade ini, Amerika Serikat juga melibatkan diri pada perjanjian perdagangan bebas, diantaranya *North America Free Trade Agreement* (NAFTA) dan perjanjian perdagangan bebas Israel-Amerika Serikat.

Menurut situs *US International Trade Administration*, hingga saat ini, Amerika telah menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Australia, Bahrain, Chile, Colombia, Israel, Jordan, Korea, Maroko, Oman, Panama, Peru dan Singapura secara bilateral dan melakukan kerjasama perdagangan bebas multilateral dengan Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada (NAFTA) dan Costa

Rica, Republic Dominica, El Salvador, Guatemala, Honduras dan Nicaragua (DR-CAFTA).

Pada masa pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat berupaya untuk mendekatkan diri pada kawasan Asia Pasifik melalui kebijakan *Pivot to Asia*. Produk yang paling menonjol dari kebijakan ini adalah *Trans Pacific Partnership* (TPP). TPP merupakan perjanjian perdagangan oleh negara-negara yang bersinggungan dengan Samudera Pasifik, antara lain Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Amerika Serikat, Vietnam, Chile, Brunei, Singapura dan Selandia Baru. TPP dirancang untuk menjadi perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia dan mencakup 40% dari ekonomi global. Perjanjian ini mencakup negara-negara yang berasal dari empat kawasan berbeda di Asia Pasifik, antara lain, Asia Timur: Jepang, Asia Tenggara: Brunei, Malaysia, Singapura dan Vietnam, Oseania: Australia dan Selandia Baru, Amerika Latin: Chile dan Peru serta Amerika Serikat sebagai bagian dari Amerika Utara. Negara-negara TPP apabila digabungkan juga merepresentasikan pasar ekspor terbesar ke empat bagi Amerika Serikat.

Secara garis besar, tujuan utama masuknya Amerika Serikat ke TPP adalah untuk memperkuat aliansi keamanan bilateral, memperdalam hubungan kerja dengan *emerging powers*, terlibat dengan institusi multilateral relasional, memperluas perdagangan dan investasi, dan memajukan demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu, TPP akan memudahkan pengusaha, petani, dan pemilik usaha kecil Amerika untuk menjual produk-produk buatan Amerika di luar negeri dengan menghilangkan lebih dari 18.000 pajak & hambatan perdagangan lain untuk produk-produk Amerika di 11 negara mitra TPP.



Gambar 1 sumber: <http://www.coha.org/the-trans-pacific-partnership-free-trade-at-what-costs/>

Terpilihnya Donald Trump pada tahun 2016 membuat kebijakan perdagangan Amerika Serikat mengalami pergeseran. Donald Trump, yang notabene merupakan kader dari partai Republikan, melalui jargon ‘*Make America Great Again*’, berupaya untuk mengembalikan peran negara sebagai aktor yang dominan dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Trump juga menandatangani dua perintah eksekutif. Perintah pertama merupakan pengetatan tarif pada perdagangan anti-subsidi dan *anti-dumping* dan perintah kedua merupakan peninjauan defisit perdagangan Amerika Serikat dan alasannya.

Trump membuat kebijakan yang bersifat *in-ward looking* dan nasionalis, yaitu dengan mengkaji ulang dan bahkan menarik diri dari perjanjian perdagangan yang dianggap kurang menguntungkan bagi Amerika Serikat. Pada masa pemerintahannya Trump telah menarik diri dari perjanjian TPP karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional Amerika. Trump beranggapan bahwa TPP akan merugikan Amerika Serikat pada bidang manufaktur dan ketenagakerjaan. Melalui pidatonya di Monessen, Pennsylvania, Trump menyatakan

*“The Trans-Pacific Partnership is the greatest danger yet. The TPP, as it is known, would be the death blow for American manufacturing. It would give up all of our economic leverage to an international*

*commission that would put the interests of foreign countries above our own. It would further open our markets to aggressive currency cheaters — cheaters, that's what they are, cheaters.”*

Melalui potongan pidato ini, terlihat bahwa Trump memiliki anggapan bahwa TPP akan menghancurkan sektor manufaktur Amerika dan kepentingan nasional Amerika akan dikalahkan dengan kepentingan negara lain di dalam TPP. Selain TPP, Trump juga menarik diri dari *Paris Agreement*. Menurut Trump, *Paris Agreement* akan memperlambat ekonomi Amerika Serikat dan merupakan sebuah '*permanent disadvantage*'.

Trump juga melakukan renegotiasi dengan NAFTA. Trump melalui pidatonya di Pennsylvania mengatakan bahwa NAFTA merupakan perjanjian perdagangan terburuk. Ia juga mengatakan

*“I'm going to tell our NAFTA partners that I intend to immediately renegotiate the terms of that agreement to get a better deal by a lot. Not just a little, by a lot for our workers. And if they don't agree to a renegotiation, which they might not because they are so used to having their own way — not with Trump they won't have their own way. Then, I will submit under Article 2205 of the NAFTA Agreement that America intends to withdraw from the deal.”*

Dari potongan pidato di atas, dapat dilihat bahwa Trump ingin segera melakukan renegotiasi NAFTA demi kepentingan pekerja Amerika Serikat dan apabila negara mitra NAFTA menolak renegotiasi tersebut, maka Amerika tidak akan segan-segan untuk keluar dari NAFTA.

Amerika Serikat juga terlibat perang dagang dengan China. Trump memang telah lama menuduh China melakukan perdagangan yang tidak adil dan sebagai pencuri kekayaan intelektual. Reaksi yang ditimbulkan oleh China ialah persepsi bahwa Amerika Serikat menghambat kemajuannya dalam tatanan dunia.

Pada Januari 2018, Trump memerintahkan penyelidikan atas dugaan pencurian kekayaan intelektual oleh China, yang digambarkan sebagai kebijakan perdagangan langsung yang seolah-olah menentang China. Dalam wawancara

dengan Reuters, Trump mengancam akan mengenakan denda yang besar pada China atas tuduhan pencurian kekayaan intelektualnya. Hal ini menjadi masalah karena Trump tidak menyertakan bukti-bukti yang terperinci. Fenomena ini menjadi awal dari perang dagang yang terjadi antara China dan Amerika Serikat. Perang dagang ini diwarnai oleh saling dilakukannya pengenaan tarif pada komoditas impor Amerika Serikat oleh China dan sebaliknya.

Pada pertemuan G20 di Osaka pada bulan Juni 2019, Amerika Serikat dan China secara resmi setuju untuk memulai kembali pembicaraan perdagangan setelah konsesi dari kedua belah pihak. Trump dan Xi sepakat untuk tidak mengenakan tarif baru pada masing-masing barang impor. Selain itu, Trump setuju untuk melonggarkan pembatasan pada *Huawei Technologies Co Ltd* dan China setuju untuk melakukan pembelian baru pada produk pertanian Amerika Serikat. Namun, perang dagang kembali berlangsung setelah Trump mengumumkan bahwa Amerika menerapkan tariff 10% pada 300 miliar dollar produk China. Trump juga menuduh China dalam melakukan manipulasi mata uang.

Dapat penulis lihat bahwa pada era Trump, Amerika Serikat mengalami pergeseran strategi kebijakan perdagangan internasional yang sebelumnya bebas menjadi proteksionis. Hal ini dilatarbelakangi oleh Trump yang merasa bahwa mitra dagang Amerika Serikat sebagai “*cheater*” dan melakukan perdagangan dengan tidak adil. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Trump pada dasarnya ingin mengedepankan kepentingan nasional Amerika Serikat serta bertujuan untuk memberikan keuntungan pada Amerika Serikat. Hal ini menjadi masalah sebab hasil yang diharapkan dari kebijakan yang proteksionis tersebut adalah untuk melindungi perusahaan dalam negeri dan mendorong ekspor, namun yang terjadi malah sebaliknya. Selama pemerintahan Trump, neraca perdagangan barang mengalami defisit.

Penelitian ini akan mencari tahu hubungan antara perubahan strategi kebijakan perdagangan Trump dan defisit neraca perdagangan barang Amerika Serikat. Masalah tersebut akan penulis jawab pada bab-bab berikutnya. Penulis

memilih topik kebijakan luar negeri Amerika Serikat karena tertarik pada kasus ini. Selain itu, menurut penulis data yang tersedia untuk menyelesaikan penelitian ini juga aksesibel dan penulis lebih *familiar* dan suka dengan isu-isu ekonomi politik internasional.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti keterkaitan antara perubahan strategi kebijakan luar negeri di bidang perdagangan Amerika Serikat di era Trump dengan defisit neraca perdagangan barang yang terjadi. Maka dari itu, penulis mengambil judul “**Hubungan Antara Perubahan Strategi Kebijakan Perdagangan Amerika Serikat dengan Defisit Neraca Perdagangan Barang di Era Donald Trump**”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Sejalan dengan perdagangan dunia, dinamika perdagangan di Amerika Serikat juga melalui tahap-tahap yang bersifat proteksionis hingga perdagangan bebas. Amerika Serikat menerapkan sistem pasar bebas secara besar-besaran pada era Ronald Reagan. Namun, pada saat Trump terpilih, ia cenderung membuat kebijakan yang proteksionis, seperti menarik Amerika dari perjanjian internasional seperti *Trans Pacific Partnership* dan *Paris Agreement*, melakukan perang tariff dengan China dan meminta untuk renegotiasi NAFTA. Capaian dari kebijakan ini mengacu pada penguatan industri lokal dan mendorong produksi dalam negeri, namun neraca perdagangan barang mengalami defisit yang meningkat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah:

**“Bagaimana hubungan antara perubahan strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bidang perdagangan dengan defisit neraca perdagangan barang Amerika Serikat pada era Donald Trump?”**

### **I.3 Tujuan Penelitian**

- a) Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami hubungan antara defisit neraca perdagangan barang dan perubahan strategi kebijakan perdagangan di era Donald Trump
- b) Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami perubahan kebijakan luar negeri di bidang perdagangan di era Donald Trump

### **I.4 Manfaat Penelitian**

#### **I.4.1 Manfaat teoritis**

- Dapat menambah dan memperkaya pemahaman mengenai diskursus ekonomi politik internasional pada studi Hubungan internasional
- Dapat menambah pemahaman relasi antara proteksionisme dan perdagangan bebas pada studi Hubungan Internasional
- Dapat menambah pemahaman perubahan kebijakan luar negeri bidang perdagangan di Amerika Serikat

#### **I.4.2 Manfaat Praktis**

- Dapat dijadikan rekomendasi kebijakan perdagangan internasional, khususnya mengenai relasi proteksionisme dan perdagangan bebas
- Dapat dijadikan informasi bagi pihak terkait dengan masalah yang diteliti serta bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai hubungan defisit neraca perdagangan dengan perubahan orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat

### **I.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberi pemahaman mengenai isi skripsi secara keseluruhan, penulis membagi skripsi ini menjadi 6 BAB, antara lain:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian pertama ini berisi uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah serta sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tinjauan literatur dari penelitian-penelitian dengan tema sejenis, kerangka konseptual yang penulis gunakan untuk analisa, alur pemikiran serta preposisi.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ketiga berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan menganalisis data serta waktu dan lokasi penelitian.

## BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bagian keempat berisi faktor dan analisis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam kurun waktu tertentu

## BAB V HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Terdiri dari beberapa sub bab tergantung hasil penelitian.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh isi skripsi penulis serta saran mengenai kebijakan maupun konseptual mengenai masalah terkait.